



Fisca Putri Rahdiana¹
Nazara Dea Ratna Putri²
Nadira Ayu Maharani³
Dian Fitriani Afifah⁴

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu instrumen paling penting yang ada di dalam masyarakat. Melalui wawancara yang mendalam serta observasi partisipatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran aktif kader KB, dukungan dari pemerintah daerah, serta strategi dan inovasi yang diterapkan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan program KB tersebut. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait program KB, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya tenaga penyuluh KB yang cukup. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pelaksanaan program KB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah saling berkaitan dengan erat.

Kata Kunci: Program Keluarga Berencana, Kabupaten Sumedang, Kesadaran Masyarakat Tentang KB, Strategi dan Inovasi Program KB.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Family Planning (KB) program in the community of Sumedang Regency. The Family Planning (KB) program in Sumedang Regency has become one of the most important instruments within its community. Through in-depth interviews and participatory observation, this study reveals that the success of the KB program is closely linked to the active role of KB cadres, support from the local government, as well as the strategies and innovations implemented by the relevant agencies. However, the study also identifies several challenges, such as access to quality KB services, the lack of public awareness regarding the KB program, and the high number of pregnancies outside of marriage. This study highlights the importance of a holistic and participatory approach in the implementation of the KB program in order to achieve sustainable development goals that can ultimately improve the well-being of the community. The study shows that community participation and the role of the government are closely interconnected.

Keywords: Family Planning Program, Sumedang Regency, Public Awareness of Family Planning, Strategies and Innovations of the KB Program.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan Bandung Raya. Kabupaten Sumedang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka di timur, Kabupaten Subang dan Bandung Barat di barat, Kabupaten Garut di selatan, dan Kabupaten Indramayu di Utara. Terdapat 1,178 juta jiwa penduduk di Kabupaten Sumedang, terlebih Kecamatan Jatinangor menjadi kawasan pendidikan dengan empat perguruan tinggi yang ramai akan perantau menjadikan Kabupaten Sumedang

^{1,2,3,4} Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, email: fisca23001@mail.unpad.ac.id¹, nazara23001@mail.unpad.ac.id², nadira23001@mail.unpad.ac.id³, dian.fitriani@unpad.ac.id⁴

padat penduduk. Adanya kepadatan penduduk sering kali menimbulkan masalah kesejahteraan di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara pesat sangat bersinggungan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat di daerahnya agar pertumbuhan penduduk selaras dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan Program Keluarga Berencana. Hal tersebut dilakukan dengan perencanaan jumlah anak ideal, kapan akan berkeluarga, jingga kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk mencapai kondisi sejahtera secara fisik, mental, maupun sosial. Saat ini, program Keluarga Berencana diatur dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal termasuk Program Keluarga Berencana (KB) dalam upaya pembangunan berkelanjutan dengan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pada sub-urusan Keluarga Berencana (KB) Pemerintah daerah khususnya pada kabupaten atau kota memiliki empat kewenangan yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal. Pemerintah Daerah kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan lain seperti pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten atau kota, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Riset ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumedang, khususnya melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Riset ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Program Keluarga Berencana berdampak terhadap masyarakat Kabupaten Sumedang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus serta wawancara yang mendalam untuk menganalisis Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menjelaskan serta merumuskan dengan bahasa penelitian yang didapatkan dari informan secara langsung sebagai kegiatan untuk dapat memperoleh penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kondisi yang dihasilkan deskripsi terkait objek sebuah penelitian.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Data primer diantaranya melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat, diantaranya Bapak Dadan Mulyadan sebagai ketua bidang DPPKB Kab. Sumedang dan Ibu Emay sebagai Sekretaris DPPKB Kab. Sumedang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah pencarian jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Tentunya dengan hal ini informasi dan pembahasan yang dikumpulkan lebih jelas dan saling melengkapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, observasi yang kelompok kami laksanakan yaitu di daerah Kabupaten Sumedang yang bertepatan di kantor DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Kami mengamati beberapa bagian kantor yang ada didalamnya, dimana banyaknya individu antar individu saling berkaitan, antara lain kepada bidang, sekretaris, bidang advokasi, informasi dan pergerakan. Disini kami mulai mengamati beberapa individu yang berkaitan terkait penelitian yang akan kami lakukan ini, yakni antara sekretaris dengan kepada bidang. Sekretaris ini membantu kelompok kami untuk memberikan surat pengantar kepada kepala bidang DPPKB terkait surat permohonan izin wawancara. Kedua, wawancara yang kami lakukan secara langsung pada tanggal 15 November yakni hanya melalui beberapa informan saja, dikarenakan informan lainnya memiliki agenda lain yang mendesak. Awalnya kami melakukan wawancara dengan kepada bidang DPPKB Kab. Sumedang terkait beberapa pertanyaan yang telah kami susun dimulai dari bagaimana pengimplementasiannya

hingga tantangan yang dihadapi. Setelah itu kami diarahkan kepada sekretaris DPPKB untuk meminta beberapa data-data yang kami butuhkan untuk mini riset terkait. Ketiga, Dokumentasi yang kami ambil ketika pelaksanaan mini riset ka kantor DPPKB tentunya melalui izin terlebih dahulu kepada staff yang berkaitan disana. Dokumentasi yang kami ambil diantaranya yaitu lokasi dan kondisi keseluruhan dppkb seperti apa, salah satu poster terkait program keluarga berencana, sampai data yang kami ambil ketika sedang melakukan wawancara. Tak lupa kami juga mengambil dokumentasi dengan sekretaris dan kepala bidang yang tentunya telah membantu kami dalam mini riset yang kami lakukan.

Teknik Analisis Data yang digunakan meliputi reduksi data yang memiliki arti yang sama dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, fokus terhadap hal-hal yang penting. Dengan hal ini data yang nantinya telah di reduksi akan lebih mudah dan memberikan penjelasan yang lebih jelas untuk melaksanakan penelitian pengumpulan selanjutnya. Kemudian penyajian data yang memiliki arti rangkain informasi dalam bentuk uraian yang lebih singkat, seperti bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya untuk mempermudah makna sebuah peristiwa. Selanjutnya kesimpulan/ verifikasi yang memiliki arti peneliti berusaha untuk mencari makna serta menganalisis secara mendalam dari data-data yang telah dikumpulkan. Hal-hal yang dicari diantaranya adalah hubungan persamaan, pola tema, hipotesis yang nantinya dituangkan kedalam kesimpulan.

Selanjutnya dilakukan pengabsahan data untuk memastikan apakah data-data yang diperoleh lebih transparansi dan akuntabel. Salah satu upaya yang digunakan yakni teknik triangulasi waktu, sumber dan juga teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Sumedang termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka TFR dibawah TFR provinsi, yang dimana TFR Provinsi Jawa Barat berada di rata-rata 2,07 sedangkan pada tahun 2023 TFR kabupaten Sumedang mencapai 2,04. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian dari implementasi program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

Selain itu tak lupa juga adanya hubungan kerjasama antara Dinas DPPKB dengan stake holder lainnya, seperti masyarakat, tenaga penyuluh KB, dan dinas lainnya yang berkesinambungan dalam upaya keberlanjutan dan keberlangsungan program KB khususnya di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014	
SUB URUSAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk.
	b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
	c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.

- | |
|--|
| d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |
|--|

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam Program KB DPPKB Kab Sumedang

Salah satu program pendukung KB dalam pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 pada sub urusan keluarga berencana di Kabupaten Sumedang yakni diantaranya pelaksanaan penyuluhan program Keluarga Berencana ke setiap desa di Kabupaten Sumedang. Terdapat 2 penyuluhan yang dilaksanakan, yakni penyuluhan langsung dan penyuluhan terpadu. Penyuluhan Langsung: DPPKB melalui tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) memberikan penyuluhan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat di tingkat desa atau kelurahan mengenai manfaat KB, jenis kontrasepsi yang tersedia, serta cara dan prosedur penggunaannya. Penyuluhan Terpadu: Penyuluhan dilakukan dalam bentuk kegiatan yang lebih luas, sering kali dengan menggandeng instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan instansi sosial lainnya untuk menyampaikan pesan yang lebih komprehensif tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, dan pengendalian jumlah penduduk.

Program tersebut dilakukan di 26 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Penyuluhan yang dilakukan meliputi ajakan persuasif agar masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana hingga pencerdasan mengenai alat kontrasepsi yang tersedia untuk menunjang Keluarga Berencana.

Selain itu memasuki zaman modernisasi, DPPKB Kabupaten Sumedang tentunya ikut serta mengikuti tren penyuluhan melalui media sosial dengan membuat konten-konten edukasi mengenai pentingnya Keluarga Berencana. DPPKB Sumedang memanfaatkan media sosial seperti instagram untuk mempromosikan edukasi program Keluarga Berencana, gebyar pelayanan KB dalam upaya penurunan stunting, ajakan kepada masyarakat terhadap pentingnya program KB dan lain lain. Instagram yang dapat dicek pada laman @officialdppkb3asumedang. Lain daripada itu, DPPKB Sumedang juga menggunakan media sosial berupa aplikasi whatsapp yang nantinya terdapat grup untuk masyarakat yang berisi tentang informasi-informasi terkini yang sesuai dengan program KB. Kemudian media sosial ini juga sangat terbuka untuk masyarakat dapat menjawab pertanyaan seputar program KB secara online.

Menurut Bapak Dadan Selaku Ketua Bidang DPPKB Kab Sumedang, penyuluhan melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara masif dan masyarakat lebih tertarik untuk menyimak edukasi yang diberikan. Menurut beliau, saat ini masyarakat lebih tertarik dengan konten media sosial yang dapat diakses lebih mudah dan efektif. Tentunya dengan hal-hal yang sudah dilakukan, Pak Dadan berharap hal ini dapat membantu untuk keberlanjutan serta keberlangsungan program KB di Kabupaten Sumedang.

Peran tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) DPPKB Kab Sumedang

Dalam rangka upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana tentunya diperlukan edukasi kepada masyarakat baik melalui penyuluhan secara langsung ataupun melalui media sosial. Untuk menjangkau masyarakat diperlukan peran tenaga penyuluh dan petugas lapangan bersertifikasi agar program dapat dilaksanakan secara optimal. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang melakukan beberapa upaya dalam mengoptimalisasikan sumber daya manusia dengan melaksanakan berbagai pelatihan untuk penyuluh dan petugas salah satunya program peningkatan kapasitas PLKB NON PNS yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang yang meliputi pematerian dengan narasumber dari internal DPPKB hingga narasumber dari berbagai instansi terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Petugas juga dapat berperan sebagai fasilitator, dapat menjalin hubungan saling menguntungkan dengan masyarakat, serta mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sekitar. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumedang ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB

Selain dari hal itu, adanya pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB yang dilakukan oleh DPPKB Kab Sumedang yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 pada sub urusan keluarga berencana di Kabupaten Sumedang yakni, Bapak Dadang selaku Kepala Bidang DPPKB Kab Sumedang menyebutkan bahwa tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya sebatas mendistribusikan atau menyediakan alat dan obat kontrasepsi. Namun yang melaksanakan kegiatannya yaitu dari dinas kesehatan.

Didapat dari laman [@sumedangkab.go.id](https://sumedangkab.go.id) Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang baru saja melaksanakan kegiatan pelayanan KB gratis, yang dimana pelaksanaan kali ini memperingati Hari Kontrasepsi se Dunia. Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKBP3A Kabupaten Sumedang, Dadan Mulyadan, menyatakan bahwa kegiatan pelayanan KB dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia akan berlangsung dari 10 hingga 20 September 2024.

Pelayanan KB ini akan dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, termasuk tempat praktek mandiri bidan, rumah bersalin, dan fasilitas pelayanan lainnya. "Jenis pelayanan KB yang diberikan meliputi MOP, MOW, IUD, implan, suntik, pil, dan kondom, dengan fokus utama pada kontrasepsi jangka panjang," jelas Dadan pada Kamis, 26 September 2024. Pada hari terakhir kegiatan, yang diselenggarakan di Puskesmas Jatigede, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli turut hadir, didampingi Direktur RSUD Umar Wirahadikusumah dr. Enceng SpB dan Kepala Dinas Kesehatan Aceng Solahudin. "Pada 20 September 2024, di Puskesmas Jatigede, terdapat 5 peserta yang menerima IUD dan 25 orang yang memilih implan," tambah Dadan.

Secara keseluruhan, meskipun DPPKB memiliki tanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan KB sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara dua instansi untuk mencapai tujuan program keluarga berencana di Kabupaten Sumedang.

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Daerah dalam Pelaksanaan KB DPPKB Kab Sumedang

Penguatan organisasi lokal dalam implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumedang merupakan suatu inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Di mana pada program ini berfokus pada pengembangan serta pemberdayaan sumber daya tersebut akan digabungkan untuk mencapai tujuan dari program ini.

Pada Agustus 2024, sebanyak 54 unit kendaraan roda dua telah disalurkan kepada para penyuluh KB dalam rangka untuk meningkatkan peran Organisasi Daerah (DPPKB) dalam pelaksanaan KB, hal tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta memfasilitasi transportasi para penyuluh ke lokasi pelayanan. Dalam pelaksanaan program tersebut, DPPKB Kabupaten Sumedang berkolaborasi yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan puskesmas dan dokter swasta setiap tiga bulan, untuk menyediakan dukungan berupa alat kontrasepsi dan perlengkapan lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) berfungsi sebagai perantara, sementara Dinas Kesehatan mendistribusikan dokter dan perawat ke lokasi untuk menangani aspek teknis. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar informasi yang nanti diberikan dapat diterima dengan baik dan mengerti manfaat dari program KB yang disediakan oleh pemerintah.

Tantangan yang Dihadapi oleh DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kab Sumedang dalam Implementasi Program Keluarga Berencana (KB)

Disamping kesuksesan DPPKB Kabupaten Sumedang dalam menekan angka TFR tentunya terdapat tantangan yang perlu dihadapi, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa

tantangan utama pada program keluarga berencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat program keluarga berencana, masih diperlukan banyak pelatihan kepada tenaga penyuluh agar pemberian edukasi kepada masyarakat lebih optimal, hingga pergaulan bebas remaja yang masih sulit untuk dikendalikan. Kendala selanjutnya yakni kurangnya sumber daya manusia atau tenaga penyuluh KB yang cukup. Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh DPPKB sering kali menghadapi kekurangan jumlah penyuluh KB atau petugas lapangan (PKB/PLKB) yang terlatih dan tersebar merata di seluruh wilayah. Kekurangan tenaga penyuluh ini menyebabkan keterlambatan dalam penyuluhan kepada masyarakat dan menurunkan cakupan layanan KB. Terakhir, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program. DPPKB Kabupaten Sumedang mengandalkan anggaran dari APBD dan DAK, namun alokasi yang ada menurut ketua bidang DPPKB Kab Sumedang masih dianggap kurang untuk mendukung semua kegiatan yang diperlukan

Lain dari hal itu, kendala yang kami temukan pada laman [@sumedangkab.go.id](https://sumedangkab.go.id) terkait identifikasi kendala pelayanan KB yang disampaikan oleh kepala Bidang DPPKB, menurut Bapak Dadan upaya dalam pelaksanaan pelayanan KB secara signifikan dilakukan, tetapi masih terdapat kendala dalam pencapaian target. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi pelaporan pelayanan KB yang berisi promosi, pelayanan, pengendalian lapangan, serta permasalahan stunting. Ujarnya pada Selasa, 15 Oktober, 2024. Evaluasi-evaluasi yang dilakukan ini tentunya menyesuaikan dengan modernisasi, yakni menggunakan aplikasi yang bernama operator SIGA. Operator SIGA digunakan sebagai salah satu sarana untuk evaluasi rutin yang dikemas dalam sebuah aplikasi. Menurutnya, SIGA ini bukan sekedar sistem informasi belaka, melainkan dapat digunakan untuk mengarahkan permasalahan dan bisa merumuskan penanganan selanjutnya. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai wadah informasi yang dikemas menjadi kekinian dan juga akuntabel dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem data yang lebih transparan, akuntabel, dan akurat yang dapat menghubungkan sejumlah data basis keluarga Indonesia bersama sistem informasi kependudukan.

Rekomendasi Perbaikan Program

Mengacu pada tantangan-tantangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa inisiatif yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Sumedang belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah perbaikan agar program yang ada dapat terus dijalankan dengan hasil yang maksimal. Program-program tersebut mampu berfungsi secara optimal, menghasilkan output yang maksimum. Evaluasi atau penilaian efektivitas suatu program dapat dilakukan melalui analisis hasil dari program tertentu. Melakukan analisis terhadap program tertentu yang hasilnya belum sejalan dengan ekspektasi, serta mengoptimalkan program yang sudah ada. Penting untuk melakukan peningkatan. Pengembangan profesional bagi petugas/karyawan untuk melakukan penyuluhan dengan melalui cara yang menarik dan tidak monoton dengan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dapat dilakukan secara efektif agar masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan mudah. Memiliki keterampilan, serta kreativitas yang relevan dapat menjadi salah satu rekomendasi perbaikan program yang dapat dirumuskan oleh DPPKB Kabupaten Sumedang.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam program Keluarga Berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang melibatkan penyuluhan di setiap desa sesuai UU No 23 Tahun 2014. Terdapat dua jenis penyuluhan: langsung, yang memberikan informasi tentang manfaat dan jenis kontrasepsi, serta terpadu yang melibatkan instansi lain untuk menyampaikan pesan kesehatan reproduksi. DPPKB juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menjangkau masyarakat dengan konten edukasi, bertujuan meningkatkan partisipasi dalam program KB. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia, upaya DPPKB

menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Keluarga Berencana.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang melaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan petugas, termasuk program peningkatan kapasitas untuk PLKB NON PNS. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari internal DPPKB dan instansi terkait, bertujuan untuk menjadikan petugas sebagai fasilitator yang dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sekitar. Upaya ini merupakan bagian dari kewenangan DPPKB sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dalam program Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang bertanggung jawab untuk pengendalian dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi sesuai UU No 23 Tahun 2014, sementara pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Meskipun DPPKB menyediakan alat kontrasepsi, pelaksanaan layanan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, menunjukkan kolaborasi antara kedua instansi untuk mencapai tujuan program keluarga berencana di Kabupaten Sumedang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan dokter swasta setiap tiga bulan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat kontrasepsi dan perlengkapan lainnya. DPPKB berfungsi sebagai perantara, sementara Dinas Kesehatan mendistribusikan tenaga medis untuk menangani aspek teknis. Tujuan dari kolaborasi ini adalah agar informasi mengenai manfaat program Keluarga Berencana dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Pertama, terdapat kekurangan sumber daya manusia, dengan jumlah tenaga penyuluh KB yang tidak memadai dan tidak tersebar merata, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyuluhan dan menurunnya cakupan layanan KB. Kedua, keterbatasan anggaran dari APBD dan DAK juga menjadi kendala utama, di mana alokasi yang ada dianggap masih kurang untuk mendukung semua kegiatan yang diperlukan. Meskipun DPPKB telah melakukan upaya signifikan dalam pelayanan KB, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang diinginkan.

Untuk menghadapi tantangan ini evaluasi efektivitas program melalui analisis hasil sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengembangan profesional bagi petugas penyuluh juga diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan efektif, sehingga masyarakat dapat menerima edukasi dengan lebih baik. Keterampilan dan kreativitas yang relevan menjadi rekomendasi penting untuk perbaikan program yang dapat dirumuskan oleh DPPKB Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodi, E. (2024). Pelayanan KB Gratis Memperingati Hari Kontrasepsi se-Dunia Kabupaten Sumedang. [Sumedangkab.go.id. https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pelayanan-kb-gratis-memperingati-hari-kontrasepsi-se-dunia](https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pelayanan-kb-gratis-memperingati-hari-kontrasepsi-se-dunia)
- Endan Dodi Kusnaedi. (2024). PENYULUH KB DAPAT KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA “Identifikasi Kendala Pelaporan Pelayanan KB - Kabupaten Sumedang.” [Sumedangkab.go.id,2024,sumedangkab.go.id/berita/detail/identifikasi-kendala-pelaporan-pelayanan-kb](https://sumedangkab.go.id/berita/detail/identifikasi-kendala-pelaporan-pelayanan-kb). Accessed 25 Nov. 2024.
- Masyarakat Dan Desa, D. P. (n.d.). Standar Pelayanan Pada Dinas Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang.
- Pendahuluan, B., Latar, A., & Penelitian, B. (n.d.). Retrieved December 23, 2024, from https://digilib.uinsgd.ac.id/39738/4/4_bab1.pdf
- PERBUP Kab. Sumedang No. 183 Tahun 2021. (2021). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218471/perbup-kab-sumedang-no-183-tahun-2021>
- Ridwan. (2024). View of PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DI DESA CITENGAH KABUPATEN SUMEDANG. [Unpas.ac.id](https://unpas.ac.id).

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/1059/585>

Rika Kusdinar. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM AKADEMI KELUARGA JABAR JUARA DALAM MENCEGAH CHILDREN STUNTING DI KABUPATEN SUMEDANG, *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, Volume 7

S, P. (2023). Pemberdayaan Ormas dalam Pembangunan Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat - Kabupaten Sumedang. [Sumedangkab.go.id](https://sumedangkab.go.id).

<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pemberdayaan-ormas-dalam-pembangunan-wujudkan-kesejahteraan-masyarakat>

Sinatria Kampung Ciburuan. "Profil Kabupaten Sumedang - Sumedang Tandang." *SumedangTandang, 2024*, sumedangtandang.com/sumedang/profil.htm#google_vignette. Accessed 25 Nov. 2024.

sumedangkab.go.id. (4 C.E.). PENINGKATAN KAPASITAS PLKB NON-PNS TAHUN 2020.